

ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TERHADAP PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI USAHA KECIL TENUN IKAT TROSO

Samsul Arifin

Abstraksi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah No.9 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2007, membawa perubahan dalam upaya pembangunan di daerah, salah satu perubahan tersebut adalah perhatian terhadap pembangunan sektor industri dan usaha kecil menengah di daerah. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terjadinya penyusunan kebijakan terhadap UKM yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi upaya peningkatan usaha, pengembangan dan pemberdayaan UKM.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pengembangan ekonomi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jepara telah memenuhi tuntutan kebutuhan lingkungan sentra industri UKM tenun ikat Troso. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan alternatif kebijakan dalam rangka penyempurnaan dan penataan program guna membantu meningkatkan usaha sentra industri UKM tenun ikat Troso sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dari penelitian dapat diketahui bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Pengembangan sentra industri UKM tenun ikat Troso belum berjalan dengan baik. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra industri tenun ikat Troso belum sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Disarankan agar Pemerintah kabupaten Jepara melakukan revitalisasi program pemberdayaan UKM di sentra industri tenun ikat Troso dengan memperhatikan aspek kebutuhan komunitas (pengembangan UKM berbasis komunitas) menuju optimalisasi potensi sentra industri tenun ikat Troso. Serta melakukan penelitian evaluasi kebijakan tentang UKM sehubungan dengan upaya pemberdayaan UKM di sentra industri tenun ikat Troso.

Kata Kunci : *kebijakan pemerintah, sentra industri, UKM, tenun ikat Troso*

Pendahuluan

Belakangan ini perhatian berbagai kalangan terhadap keberadaan Usaha kecil menengah (UKM) semakin meningkat. Perhatian, Perhatian tersebut, menunjukkan fenomena perubahan orientasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Apalagi setelah kita terkena badai krisis moneter, ternyata dampak krisis moneter terhadap UKM tidak begitu parah seperti industri-industri besar sempat ada yang menutup industrinya yang mengakibatkan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerjanya. Walaupun industri kecil juga menutup industrinya namun sifatnya hanya sementara.

Sejarah perekonomian menunjukkan bahwa, pada awalnya perhatian pemerintah di banyak Negara di dunia lebih tertuju kepada usaha besar. Namun, dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi perubahan-perubahan orientasi yang cukup dinamis. Pemerintah mulai memperhatikan dan mengakui keberadaan UKM.

Konsistensi dan komitmen pemerintah dalam memberdayakan UKM, menunjukkan sector tersebut dalam system perekonomian Indonesia. Dimana pengembangan usaha kecil merupakan topic penting yang harus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar peranannya lebih efektif. Bahwa UKM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, posisi UKM dikatakan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Di Indonesia peran UKM masih lebih banyak sebagai "figuran" ketimbang "peran pembantu". Kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam menguasai manajemen modern menjadi salah satu factor penyebab kurang berkembangnya UKM selain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kelangsungan produksi. Oleh karena itu pengembangan UKM perlu diberi kemudahan baik dalam permodalan, perijinan maupun pemasaran serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pembangunan industri.

Sejak masa orde baru hingga saat ini telah banyak program-program pengembangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung UKM di tanah air. Diantaranya yang penting adalah pengembangan sentra-sentra industri, program kemitraan dengan system bapak angkat, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi dan berbagai macam skema kredit.

Tapi sayangnya, secara umum kondisi UKM, seperti juga usaha kecil di sector-sector lainnya di Indonesia hingga saat ini masih relative belum bias berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan UKM yang ada di Negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. Di sector industri manufaktur walaupun tersedia fasilitas kredit murah bagi pengusaha-pengusaha kecil dan rumah tangga, dan pemerintah juga membantu pengembangan sentra-sentra industri kecil dengan menyediakan fasilitas-fasilitas umum di dalamnya (seperti UPT) dan kebijakan mengenai kemitraan, tingkat produktivitas atau kontribusi nilai tambah dari industri kecil terhadap pembentukan total nilai tambah di sector tersebut masih relative sangat rendah, dibandingkan pangsa nilai tambah dari industri menengah dan besar. Kontribusi output yang rendah ini tidak lepas dari kenyataan bahwa masih banyak kendala, baik yang sifatnya internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

Seperti halnya yang terjadi di Jepara. Salah satu sector industri kecil yang berkembang di Jepara adalah industri tenun ikat Troso yang terletak di Desa Troso Kecamatan Pecangaan. Pada awal perkembangannya sempat mengalami trade mark dikalangan middle up, akan tetapi kembali pada aspek manajerial yang kurang dan aspek pasar yang hanya bertumpu pada satu system, industri tenun ikat Troso akhirnya mengalami penurunan produksi, apalagi tenun ikat senantiasa

bididentikkan dengan produk bali atau Yogya. Akibatnya perkembangan tenun ikat Troso mengalami kemunduran. Namun demikian potensi perkembangan usaha dibidang ini masih relative terbuka, apalagi produk tenun merupakan barang yang sangat dibutuhkan konsumen khususnya konsumen luar negeri.

Hal-hal diatas yang mendasari perlunya melakukan re-evaluasi dan analisis terhadap kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi di daerah. Karena peran strategis pemerintah dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan *Good Government* dalam kerangka otonomi daerah dan sekaligus upaya memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, khususnya terhadap pelaku usaha kecil menengah di daerah.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Batasan atau definisi industri kecil menengah ternyata bervariasi tergantung konsep yang digunakan suatu negara, sehingga untuk negara yang satu berlainan dengan negara lain. Yang jelas dalam definisi tersebut (industri kecil menengah) mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan atau kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employees*). (Tiktik Sartika, 2002:12).

Demikian juga dengan batasan atau definisi usaha kecil menengah di Indonesia juga beragam dan tergantung bagaimana masing-masing institusi memaknainya, sehingga belum ada keseragaman definisi yang disepakati bersama.

Departemen Perindustrian mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari :

1. Industri dasar yang meliputi kelompok Industri mesin dan Logam dasar (IMLD) dan Kelompok Kimia Dasar (IKD).
2. Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit.
3. Industri Hilir yaitu kelompok aneka industri (AI) yang meliputi antara lain industri yang mengolah sumberdaya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan

Sedangkan menurut Badan Statistic, apabila didasarkan pada jumlah tenaga kerja maka pengelompokan industri dibedakan menjadi empat :

1. Perusahaan atau industri besar, jika mempekerjakan 100 orang atau lebih.
2. Perusahaan atau industri sedang, jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang
3. Perusahaan atau industri kecil, jika mempekerjakan 5-19 orang
4. Industri kerajinan rumah tangga, jika mempekerjakan kurang dari 3 orang.

Selain pengelompokan kedua tersebut, masih ada pengelompokan lain, yaitu dibedakan menjadi industri padat modal dan industri padat karya.

Menurut UU No.9 tahun 1995, apabila dilihat dari segi keuangan dan modal maka definisi usaha kecil menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 Milyar pertahun. Menurut Tiktik sartika (2002) meskipun banyak ragam batasan usaha kecil menengah dapat disebutkan bahwa criteria umum usaha kecil menengah dilihat dari cirri-cirinya pada dasarnya bias dianggap sama, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana
2. Tanpa staf yang berlebihan
3. Pembagian kerja yang "kendur"
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek
5. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan
6. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di sentra industri UKM tenun ikat Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Jawa Tengah

Populasi

Populasi penelitian adalah perajin dan pengusaha yang terikat pada Sentra Industri UKM tenun ikat Troso.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif, baik berupa data primer maupun data sekunder. Sifat naturalistic menuntut agar diri sendiri dan orang lain menjadi instrument pengumpul data sesuai dengan kemampuannya, menyesuaikan diri dengan realitas.

Data yang diharapkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data (informan) yang berasal dari Dinas, Adan dan Kantor, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta hasil diskusi kelompok terfokus dengan para perajin dan pengusaha di sentra industri tenun ikat Troso. Disamping itu dilakukan juga pengamatan

Data sekunder diperoleh dari key informan diharapkan memberikan data resmi, peraturan perundang-undangan, laporan resmi baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, serta dokumen lainnya yang sah melalui studi dokumentasi.

Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian populis, sehingga bila terdapat sustu kasus menonjol pada variable atau indicator tertentu akan diperlakukan sebagai suatu kasus dengan sample secara purposive. Sifat naturalistic menghindari sample secara acak, menekan kemungkinan kasus yang menyimpang karena sejumlah variable menjadi moderat, dan karakteristik ekstrim tidak tampak. Dengan sample purposive, hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim, sehingga hal yang di cari tampil menonjol dan mudah ditangkap maknanya.

Analisa Data

Untuk memperoleh hasil penelitian secara lebih akurat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Analisa data dilakukan berdasarkan focus permasalahan yang dihadapi serta distribusi variable penelitian dan variable temuan dalam proses penelitian lapangan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kondisi Geografis Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara terletak antara 3°23'20" sampai 4°9'35" Bujur Timur dan 5°43'30" hingga 6°47'44" di lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan laut Jawa.

Secara geografis Kabupaten Jepara merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah yang paling menjorok ke utara dan mempunyai wilayah yang berupa pulau-pulau yang relatif jauh dari pantai. Luas wilayahnya adalah 100.413,19 Ha atau 1.004,13 km² yang terdiri 14 kecamatan dan 192 desa/kelurahan.

Dalam perwilayahan pembangunan propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara termasuk perwilayahan pembangunan 10 dengan pusat perkembangan kota Kudus.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Jepara adalah bergunung, berbukit dengan tingkat kemiringan/lereng dan ketiinggian yang bervariasi, berdataran rendah dan berpantai landai. Ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah antara 0 hingga 1.301 meter.

Dari segi klimatologis Kabupaten Jepara memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti setiap tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 25-26 celsius, dengan kelembaban berkisar antara 53%-62% pertahun. Jumlah curah hujan rata-rata bulanan minimum 10mm dan maksimum 916 mm serta banyaknya hari hujan rata-rata 96 hari dalam setahun.

Visi Misi Kabupaten Jepara

Visi Kabupaten Jepara adalah : Terwujudnya citra Kabupaten Jepara yang maju, sejahtera, damai, demokratis, mandiri yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, religius dan berakhlak mulia, serta potensi ekonomi strategis daerah yang produktif, kompetitif, kondusif dan berwawasan lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan visi kabupaten Jepara dirumuskan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan taqwa.
- Mengembangkan potensi ekonomi strategis untuk mendukung laju pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- Memberdayakan perekonomian rakyat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- Meningkatkan dan membina pemberdayaan daerah menuju kemandirian daerah (peningkatan pendapatan daerah).
- Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur daerah (sarana prasarana kegiatan ekonomi dan kegiatan social) yang efektif dan efisien.
- Penataan dan optimalisasi kelembagaan daerah dan pengembangan jaringan kerjasama serta lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.



Potensi Perekonomian

1. Industri dan Perdagangan

Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan selama lima tahun terakhir memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PDRB kontribusi sektor ini, rata-rata setiap tahun sebesar 25,83%. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini didukung sub sektor industri kecil/rumahan tangga sebesar 61,23% dan industri besar, sedang sebesar 38,77%.

Pertumbuhan sektor industri seperti meubel ukir, tenun ikat trosol, konveksi, rotan, monel, keramik dan sebagainya tergambar dalam jumlah unit usaha dan nilai produksi yang dihasilkan. Pada tahun 1998 jumlah usaha sebanyak 10.389 unit, tahun 1999 menjadi 10.204 unit dan mampu menyerap tenaga kerja 185.749 orang. Nilai produksi yang dihasilkan dari beragam unit usaha di atas pada tahun 1998 sebesar Rp. 2.497.274,12 juta kemudian di tahun 1999 meningkat menjadi Rp. 4.217.038,1 juta.

Kondisi ekonomi setana krisis menunjukkan bahwa industri kecil mempunyai daya resistensi terhadap perubahan sosial ekonomi, sehingga relatif mampu bertahan dibanding industri skala besar utamanya yang menggunakan bahan baku import. Namun dalam pengembangan industri kecil terhambat oleh lemahnya akses akan bahan baku, modal, manajemen, teknis produksi dan desain serta akses pasar.

Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kabupaten sebesar 23,15%. Pada sub sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 93,7% terhadap proporsi PDRB sector perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2000.

Perkembangan perdagangan dilihat dari nilai ekspor berbagai jenis komoditi pada tahun 1998, sebanyak US \$ 171.514.637,78 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor tahun 1997 yang mencapai US \$ 149.419.981,30 dan tahun 1999 sebanyak US \$ 203.014.260,90, jumlah nilai ekspor pada tahun 2000 mencapai US \$ 202.204.669,28. kenaikan yang cukup besar pada tahun 1999 dipicu dengan adanya perbedaan nilai tukar mata uang dan besarnya permintaan pasar.

Perdagangan di kabupaten Jepara meliputi perdagangan skala kecil, menengah sampai perdagangan besar, sedangkan jangkauan pasarnya disamping lingkup lokal, regional, nasional dan internasional. Prasarana perdagangan berupa pasar desa sebanyak 26 buah, pasar umum 18 buah, pasar swalayan 1 buah. Kondisi sarana prasarana perdagangan lokal utamanya pasar, pada umumnya belum memenuhi persyaratan, kondisi yang demikian belum dapat diselesaikan dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan partisipasi masyarakat masih kurang.

2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan Koperasi pada tahun 2004 cukup baik hal ini terlihat dari jumlah koperasi yang ada. Jumlah koperasi sebanyak 488 dan semuanya sudah berbadan hukum dengan total asset 60.811.429.000, tercatat 17 buah Koperasi Unit Desa, 161 buah koperasi kelompok tani KTT, 61 buah Koperasi Pegawai Negeri, 1 buah Koperasi Kepolisian, 1 buah Koperasi angkatan darat, 31 buah Koperasi Pondok Pesantren, 49 buah Koperasi Kerajinan Kopinkra, 22 buah Koperasi Karyawan, 5 buah Koperasi Pemuda, 38 Koperasi Serba Usaha, 41 buah Koperasi jenis lain. Pada sub sektor usaha kecil dan menengah UKM ada sekitar 5.000 UKM.

Dilihat dari jumlah koperasi seperti tersebut di atas sudah cukup besar, namun apabila dilihat kualitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Koperasi yang diharapkan sebagai salah satu alternatif peningkatan masih sebatas sembunyi, banyak koperasi yang didirikan namun tidak ada upaya peningkatan yang dapat mensejahterakan anggotanya. Peran koperasi yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat terkendala dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, monev, akses permodalan dan kurangnya kesamaan persepsi antara pengurus dengan anggotanya.

3. Pengembangan Dunia Usaha

Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di negeri ini, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah termasuk di dalamnya perkembangan dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka peningkatan perekonomian peran dunia usaha sangat diperlukan, dunia usaha diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru.

Terlaksunanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan investasi di daerah yang diharapkan dapat mendorong pengembangan dunia usaha sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Pengembangan dunia usaha dapat dilihat dari manifestasi kegiatan investasi mayoritas yaitu pada sektor industri, dimana pada delapan tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup besar. Nilai investasi tahun 1996 sebesar Rp. 6.116.312 juta, meningkat pada tahun 1999 menjadi Rp. 51.535.784 juta atau selama tiga tahun naik sebesar 766%. Nilai investasi PMA yang telah mendapat persetujuan tetap pada tahun 1999 senilai US\$ 6.455.000, tetapi pada tahun 2000 turun menjadi sebesar US\$ 1.192.746,25. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kondisi sosial politik dalam negeri yang kurang menguntungkan.

Dilihat dari jumlah unit usaha sektor industri juga mengalami pertumbuhan cukup besar yakni tahun 1996 sebanyak 7.946 unit, pada tahun 1999 bertambah menjadi 12.577 unit usaha. Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya peluang usaha dan minat masyarakat untuk melembagakan usahanya secara formal guna memperoleh akses modal.

4. Gambaran Umum Sentra Industri Kecil Tenun Ikat Troso

Jepara adalah merupakan salah satu kota industri yang cukup di kenal di Indonesia. Keberadaan sentra-sentra industri di Kabupaten Jepara adalah buah dari pesatnya permintaan produk industri di daerah ini. Sentra-sentra industri tersebut merupakan akar dari sektor industri secara umum. Karena itu eksistensi mereka harus diakui merupakan aset bagi pemerintah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Salah satu sentra industri kecil yang berkembang di Jepara adalah sentra Industri Kecil Tenun Ikat Troso yang berada di Desa Troso Kecamatan Pecangiran Kabupaten Jepara. Jumlah UKM yang mengueluti usaha tenun ikat Troso ada 191 buah UKM dengan jumlah tenaga kerja 3403 orang tenaga kerja.

Pengertian sentra industri kecil tenun ikat Troso adalah sentra industri yang tumbuh secara alamiah dan berkembang atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Penggolongan sentra industri

kecil tenun ikat troso kedalam golongan industri yang tumbuh secara alamiah didasarkan atas penilaian terhadap kondisi dan karakteristik dari sentra industri tenun ikat troso tersebut.

Cluster atau sentra industri skala kecil dapat didefinisikan sebagai suatu konsentrasi dari sekumpulan perusahaan-perusahaan kecil sejenis (dalam arti dibidang usaha atau sub sektor yang sama) di suatu lokasi yang sama. Ada sentra-sentra industri yang tumbuh secara alamiah ada sentra yang khusus diciptakan oleh pemerintah, misalnya PIK (Perkampungan Industri Kecil atau LIK (Lingkungan Industri Kecil). (Dr. Tulus Tambunan, 1999:134).

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara dapat di peroleh data umum tentang sentra industri tenun ikat troso sebagai berikut :

DATA SENTRA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO

NO	DATA UMUM	TAHUN 1998	TAHUN 2000	TAHUN 2003
1	Jumlah unit usaha	165 unit	96 unit	191 unit
2	Lokasi	Troso	Troso	Troso
3	Tenaga Kerja	5.607 orang	3.403 orang	6.210 orang
4	Nilai Investasi	Rp. 254,8 juta	Rp. 164 juta	Rp. 382,8 juta
5	Kebutuhan bahan baku	1.159,74 ton/th	540 ton/th	1.326 ton/th
6	Nilai bahan baku	Rp. 29.793,5 jt	Rp. 12.600 jt	Rp.33.150 jt
7	Nilai Produksi	Rp. 43.533,6 jt	Rp. 44.100 jt	Rp. 57.018 jt

Sumber : Dinas Perindagkop Pedal Jepara 2004.

a. Aktivitas Dan Keadaan Usaha

Produksi

Salah satu bagian dari aktivitas industri tenun ikat troso adalah kegiatan produksi. Para perajin dan pengusaha industri kecil tenun ikat troso dalam mendapatkan atau mengusahakan bahan baku utamanya yang berupa katun, misris, sutera, ordol di datangkan dari luar daerah yaitu dari Solo Pekalongan. Sedangkan bahan dari sutera banyak didatangkan dari Cina dan India.

Setiap perusahaan yang menghasilkan suatu produk tidak akan lepas dari proses produksi. Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada (Sofyan Assauri, 1980:50).

Secara umum proses pembuatan tenun ikat troso adalah sebagai berikut Proses produksi perusahaan tenun ikat merupakan proses produksi untuk dipasarkan dan berdasarkan pesanan.

Adapun langkah-langkah proses produksi tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama benang putih diketeng pada plangkan, selanjutnya bila sudah benang dalam plangkan digambar sesuai dengan pola atau motif yang diinginkan. Kemudian benang tadi diikat sesuai dengan

gambaranya, kegunaan pengikatan ini adalah untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Setelah diikat benang tadi dibasahi, selanjutnya dicelup atau diberi warna dasar. Warna dasar ini adalah biasanya warna gelap. Kemudian ikatan pada benang tadi dilepas sebagian sesuai dengan motif. Selanjutnya benang dalam plangkan tadi dibasahi atau direndam untuk kedua kalinya. Kemudian diberi warna untuk kedua kali, atau warna terang. Selanjutnya ikatan dalam benang dilepas semuanya. Sehingga telah didapat tiga warna yaitu gelap, terang dan putih.

Proses selanjutnya adalah mengeraskan benang tadi dengan cara diberi kanji atau tepung beras yang dibasahi lalu dijemur sampai kering, setelah kering disusun sesuai dengan gambar. Kemudian benang tersebut diboom atau digulung pada ATBM, dan dicucuk atau setiap helai benang disusun pada ATBM. Langkah selanjutnya adalah menenun.

Untuk mendapatkan hasil kualitas tenun yang baik, kain yang telah jadi dites cuci, yaitu direndam dalam air detergen selama satu hari satu malam. Setelah itu barang sudah jadi dan dimasukkan gudang.

Pemasaran

Setelah proses produksi selesai dan produk siap untuk dipasarkan, maka tahap selanjutnya dalam proses pemasaran adalah menentukan jalur atau m

Metode yang akan dipergunakan untuk mendistribusikan produk ke pasar. Hal ini menyangkut distribusi termasuk didalamnya pemilihan saluran distribusi dan penanganan fisik.

Dalam memasarkan produk tenun ikat Troso, para perajin dan pengusaha selain memanfaatkan show room yang ada di sepanjang jalan raya yang ada di Desa Troso, para pengusaha juga memasarkan produknya ke beberapa daerah seperti Sumatera, Medan, Surabaya, Jakarta dan Bali. Bahkan produk tenun ikat torso terbukti mampu merambah pasar ekspor meskipun melalui perantara di Bali.

b. Permasalahan Industri Tenun Ikat Troso

Dalam rangka pengembangan usaha industri tenun ikat Troso ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan secara umum diantaranya adalah permasalahan yang dapat menghambat kegiatan pengembangan usaha industri tenun ikat Troso.

Diantara permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya kesatuan visi antar kelompok yang ada di Troso
2. Akses pasar masih terbatas pada pola tradisional
3. Tidak adanya standarisasi harga.
4. Belum adanya pemahaman tentang hak cipta.
5. Penanganan limbah baik padat maupun cair masih sangat kurang di pahami oleh masyarakat.
6. Hampir semua UKM tidak Bankable sehingga mudah terjerat oleh rentenir
7. Aspek SDM yang lemah dimana UKM kurang berjiwa Entrepreneur
8. Penanganan kelembagaan usaha yang masih sangat tradisional.

c. Peluang dan Tantangan Industri tenun Ikat Troso

Keberadaan Industri Tenun Ikat Troso terbukti memiliki peluang yang cukup baik untuk di kembangkan, apalagi akhir-akhir ini industri tenun ikat Troso semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kenyataan ini dapat dilihat dengan meningkatnya volume usaha tenun ikat Troso dan juga prospek usaha tenun ikat yang semakin cerah.

Gambaran tentang peluang dan tantangan Industri tenun ikat Troso antara lain :

1. Teknologi tepat guna yang lebih efisien atau efektif sudah lama ada di Indonesia
2. Eksport dan kuota masih terbuka
3. Pusat informasi dan promosi baik secara regional maupun internasional masih terbuka kesempatan dalam pengembangan pasar
4. Program kemitraan dengan perusahaan lain masih terbuka baik dengan lembaga pemerintah atau dunia usaha swasta
5. Tenaga kerja cukup tersedia
6. Komitmen pengembangan yang cukup tinggi baik pemerintah/lembaga/dunia usaha swasta maupun pengrajin industri kecil.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Pengembangan Sentra Industri Tenun Ikat Troso

Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Jepara terhadap pengembangan dan peningkatan usaha industri tenun ikat Troso selama tiga tahun terakhir hingga semester pertama tahun 2005 berdasarkan data dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Penanaman Modal Kabupaten Jepara antara lain :

- a. Pembinaan SDM
 - Pelatihan Manajemen eksport
Pelatihan ini melibatkan pengusaha tenun ikat Troso sebanyak 12 orang
 - Diklat teknis proses pewarnaan
Diklat teknis ini diikuti oleh 36 perajin tenun ikat Troso
 - Pelatihan sosialisasi HAKI
Pelatihan ini diikuti oleh 6 orang pengusaha tenun ikat Troso
 - Pelatihan AMT
Pelatihan ini diikuti 8 orang pengusaha tenun ikat Troso
 - Pelatihan Business Plan
Pelatihan ini diikuti 4 orang pengusaha tenun ikat Troso
 - Magang
Kegiatan ini melibatkan 8 orang perajin tenun
 - Studi Banding
Kegiatan ini melibatkan 1 orang pengusaha tenun ikat ke negeri China. Dan 3 orang ke Malaysia.

Kebijakan pembinaan SDM yang telah dilakukan tersebut dalam prakteknya selalu diikuti oleh beberapa orang pengusaha yang dinilai ada kedekatan emosional dengan pemerintah setempat (Dinas yang memfasilitasi kegiatan pembinaan SDM), sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak

dapat diikuti secara merata oleh para perajin maupun pengusaha tenun ikat Troso, sehingga hal demikian dapat memicu kecemburuan social diantara perajin dan pengusaha tenun ikat di Troso.

Kegiatan Studi Banding dalam rangka kunjungan ke Malaysia bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Jepara yang dilakukan pada tahun 2004 dinilai oleh pengusaha yang ikut dalam kegiatan tersebut tidak menghasilkan apa-apa karena janji pemberian order dari Malaysia sampai sekarang belum turun.

b. Bantuan Modal Kerja

Selama ini bantuan yang telah diberikan kepada kelompok perajin tenun ikat Troso baru sebesar Rp. 40.000.000 untuk 30 orang perajin yang tergabung dalam Kelompok Perajin Sentra Tenun Ikat Troso STIT. Sedangkan pada sentra tersebut masih ada tiga kelompok dari empat kelompok perajin yang ada di Troso yang sampai sekarang belum menerima bantuan modal dari pemerintah. Ketiga kelompok perajin tersebut adalah Koperasi Perajin Tenun Ikat Troso "Gotong Royong", Cluster Tenun Ikat Troso dan Koperasi Inoval Lestari.

c. Bantuan Peralatan

eralatan mesin pemeras benang telah diberikan kepada kelompok perajin tenun ikat sebanyak 1 unit.

d. Pemberian Order Seragam Dinas

Pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan kebijakan pemakaian seragam dinas dari tenun ikat Troso, sehingga Pemkab memberikan order seragam dinas dari tenun ikat kepada perajin di sentra tenun ikat Troso.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam membina dan mengembangkan UKM khususnya kebijakan terhadap sentra industri UKM tenun ikat Troso ada beberapa kebijakan yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan ada kebijakan berdasarkan kebutuhan.
- Sebagaimana kebijakan yang di analisis pada prinsipnya telah memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang di miliknya, namun demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra industri tenun ikat Troso belum sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam membina dan mengembangkan sentra industri tenun ikat Troso belum berjalan sesuai rencana program yang telah disusun mengingat belum meratanya proses pemberdayaan perajin dan pengusaha di sentra industri tenun ikat Troso. Sehingga para perajin dan pengusaha tenun ikat Troso belum maju dan berdaya atau belum merasakan dampak dari sebuah kebijakan .
- Keberadaan lembaga teknis seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sentra industri tenun ikat Troso, padahal bila di analisis melalui pendekatan komunitas maka sentra industri tenun ikat Troso sangat prospektif untuk dikembangkan.

Rekomendasi

- a. Pemerintah agar dapat melakukan revitalisasi program pemberdayaan UKM di sentra industri tenun ikat Troso dengan memperhatikan aspek kebutuhan komunitas (pengembangan UKM berbasis komunitas) menuju optimalisasi potensi industri tenun ikat Troso.
- b. Perlunya penataan, pembinaan dan pengembangan sentra industri tenun ikat Troso yang terprogram dan terstruktur secara berkelanjutan sehingga sentra industri tenun ikat Troso dapat terus berkembang.
- c. Perlunya konkretisasi dari beberapa program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam upaya pengembangan UKM sentra industri tenun ikat Troso, melalui kegiatan pelatihan, bantuan modal, pemasaran, program kemitraan dan pendampingan secara sinergis dan berkelanjutan.
- d. Diadakan penelitian evaluasi kebijakan tentang UKM sehubungan dengan upaya pemberdayaan UKM di sentra industri tenun ikat Troso.

Daftar Pustaka

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara, *Pengembangan Industri Tenun Ikat Troso*, Jepara 2004.

Irsan Azhari Saleh, 1986, *Industri Kecil*, LP3ES, Jakarta.

-----Pemerintah Kabupaten Jepara, Peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah PROPEDA Kabupaten Jepara Tahun 2001-2005.

-----Pemerintah Kabupaten Jepara, Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 9 tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah RENSTRADA Kabupaten Jepara tahun 2002-2007.

Sofyan Assauri, 1980, *Manajemen Produksi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Tiktik S.P. dan Abd Rachman S. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tulus Tambunan. 2003, *Prospek usaha Kecil dan Menengah Indonesia di dalam era Perdagangan Bebas dan globalisasi Ekonomi Dunia*.

Lampiran :1

PROBLEMSOLVING SENTRA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO

PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH
<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kesatuan visi antar kelompok yang ada di Troso- Akses pasar masih terbatas pada pola tradisional- Tidak adanya standarisasi harga- Belum adanya pemahaman tentang hak cipta- Penanganan limbah baik padat maupun cair masih sangat kurang di pahami oleh masyarakat- Hampir semua UKM tidak Bankeble sehingga mudah terjerat oleh rentenir- Aspek SDM yang lemah dimana UKM kurang berjiwa Entrepreneur- Penanganan kelembagaan usaha yang masih sangat tradisional- Pengadaan bahan baku yang masih tergantung pada perantara	<ul style="list-style-type: none">- Mengatur sistematika dan dapat mengatur ritme kelompok usaha- Membuat rencana pemasaran baik lokal, regional maupun internasional- Standarisasi harga, terkait dengan program perlindungan konsumen- Adanya sosialisasi tentang HAKI secara menyeluruh- Adanya pendekatan pola sadar lingkungan- Pembentukan Lembaga Keuangan non Bank- adanya pelatihan yang mendukung peningkatan SDM para perajin dan pengusaha

Sumber : Hasil FGD dengan Perajin dan pengusaha di Sentra Industri tenun Ikat Troso.

Lampiran II

STRATEGI PENGEMBANGAN SENTRA OLEH KELOMPOK PERAJIN DAN PENGUSAHA TENUN IKAT TROSO

STRATEGI JANGKA PENDEK	STRATEGI JANGKA PANJANG
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan, Forum Group Discussion FGD untuk klaster Troso • Pendampingan pihak eksternal seperti Pemda, BDS, Perguruan Tinggi secara menyeluruh, seperti : Penyamaan visi dan misi, kesepakatan standarisasi harga, pendekatan pemahaman lingkungan dll. • Penjajagan pembuatan Lembaga Keuangan non Bank • Pembagian tugas kelompok usaha produksi, pemasaran, bahan baku dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Daerah sentra tenun torso menjadi daerah wisata industri dan belanja tenun • Pembuatan pasar tenun ikat atau pusat perbelanjaan tenun ikat troso • Men-sinergis-kan tenun ikat troso dengan produk unggulan Jepara lainnya • Menjadikan tenun ikat torso menjadi produk unggulan Jepara, Jawa Tengah dan Indonesia

Sumber : Hasil FGD dengan Perajin dan pengusaha di Sentra Industri tenun Ikat Troso

Lampiran III

USULAN PROGRAM DAN BENTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN SENTRA OLEH KELOMPOK PERAJIN DAN PENGUSAHA TENUN IKAT TROSO

USULAN PROGRAM	BENTUK KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan • Peningkatan SDM • Peningkatan permodalan • Ada sosialisasi HAKI • Penanganan limbah produksi • Membuka akses pasar • Peningkatan kualitas produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan Pelatihan kelembagaan, ekspor import, AMT, Manajemen pemasaran, IPAL • Pameran (local, nasional, Internasional), pemasaran melalui internet, • Korespondensi • Pembentukan lembaga keuangan non bank, bantuan MAP ataupun lainnya

TAHAPAN PEMBINAAN UKM SENTRA TENUN IKAT TROSO

Bentuk	Penataan	Pengembangan	Kemandirian
Hukum	- Tanpa Ijin Usaha	- SIUPP - Perorangan - Firma CV	- SIUPP - Bentuk PT
Pemasaran	- Tradisional - Tunggu pesanan - Teknologi sederhana	- Aktif Mencari Pembeli - Masuk persaingan - Perencanaan	- Perencanaan berorientasi pasar - Pelaksanaan P4(Product,Price,Place,Promotion)
Produksi Teknologi	- Produksi Tradisional - Desain tak mengarah selera - teknologi tradisional	- Desain mengarah selera - Teknologi tepat guna	- Desain hasil studi berorientasi pasar,berjangka panjang - Mengikuti perkembangan
Organisasi SDM	- Tanpa struktur - Buruh tak tetap: Orientasi keluarga - Pemilik Modal - Upah - Tanpa pembagian kerja	- Struktur sederhana - Buruh tak tetap,dari keluarga - Perencanaan tertulis - Gaji - Pembagian kerja	- Buruh Ikatan formal - Sistem Penggajian - Gaji sesuai peraturan - Perencanaan tertulis - Pembagian tugas baik - Pendelegasian wewenang
Keuangan	- Tanpa pembukuan baku - Tanpa laporan - Keuangan keluarga dan perusahaan tercampur	- Laporan keuangan sederhana - Pemisahan keuangan pribadi - perencanaan modal	- Laporan lengkap - Laporan disurat kabar - Diaudit akuntan public - Pinjaman berimbang

Sumber : Hasil FGD dg Perajin dan Pengusaha di sentra Industri tenun ikat Troso